

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara merupakan pihak yang berwenang dalam pengelolaan sumberdaya alam dalam hal ini adalah mineral dan batubara. batubara merupakan salah satu sumber energi primer yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga ketersediaannya harus dijaga sehingga dapat digunakan selama mungkin dan memberikan manfaat yang besar bagi negara dan masyarakat Indonesia. Dalam rangka mengamankan pasokan batubara untuk jangka menengah dan jangka panjang pemerintah berusaha untuk mengendalikan produksi batubara yang selama ini selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya yang diikuti juga dengan permintaan ekspor batubara yang juga masih tinggi, sedangkan konsumsi dalam negeri masih cukup rendah oleh karena itu diharapkan dengan dikendalikannya produksi batubara ini dapat meningkatkan konsumsi pemanfaatan batubara dalam negeri, mengendalikan ekspor batubara dan pengalokasian produksi batubara menjadi lebih efektif sesuai dengan yang tertuang dalam undang-undang dan kebijakan energi nasional.

Dalam bab ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan terkait gambaran secara umum wilayah penelitian sesuai dengan cakupan penelitian diantaranya *pertama* profil Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, *kedua*, kondisi batubara nasional, *ketiga*, peta persebaran batubara di Indonesia, dan *keempat* ekspor batubara.

A. Profil Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

1. Visi

Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi batubara, peningkatan nilai tambah mineral yang berwawasan lingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

2. Misi

- a. Meningkatkan keamanan pasokan mineral dan batubara dalam negeri.
- b. Mendorong keekonomian harga batubara untuk pengembangan energi batubara.
- c. Mendorong peningkatan kemampuan dalam negeri dalam pengelolaan mineral dan batubara.
- d. Meningkatkan nilai tambah mineral.
- e. Meningkatkan pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.⁶⁷

Selain visi dan misi diatas, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara juga memiliki tugas dan fungsi dalam menjalankan pemerintahan. Direktorat Jenderal Mineral dan batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.⁶⁸ Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara juga menyelenggarakan fungsi Perumusan

⁶⁷<https://www.minerba.esdm.go.id/public/38457/visi-dan-misi/>

⁶⁸ Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Pasal 351

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara juga melakukan fungsi pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.⁶⁹

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara merupakan salah satu unit kerja Eselon I dibawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang terdiri dari 6 unit kerja :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
- b. Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
- c. Direktorat Pembinaan Perusahaan Mineral
- d. Direktorat Pembinaan Perusahaan Batubara
- e. Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara
- f. Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

Dari beberapa unit diatas, dalam penelitian terkait produksi batubara peneliti melakukan penelitian pada Subdirektorat yang berada pada Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara yaitu pada Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara. Subdirektorat Perencanaan Produksi dan

⁶⁹ Ibid Pasal 352

Pemanfaatan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan dibidang perencanaan produksi dan pemanfaatan mineral dan batubara.⁷⁰

Selain itu dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan dibidang perencanaan produksi mineral dan batubara
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan dibidang pemanfaatan mineral dan batubara.⁷¹

Pada Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara ini terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara yang memiliki tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan

⁷⁰ Ibid Pasal 384

⁷¹ Ibid Pasal 385

teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan dibidang perencanaan produksi mineral dan batubara.

- b. Seksi Pemanfaatan Mineral dan Batubara yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan dibidang pemanfaatan mineral dan batubara.⁷²

Berdasarkan uraian diatas, dalam pengelolaan sumber daya alam dalam hal ini mineral dan batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan sumber daya alam memiliki sebuah visi dan misi yang dilakukan. Dengan adanya visi dan misi ini diharapkan dapat mencapai apa yang menjadi tujuan yang diharapkan. Dalam hal produksi batubara pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam Renstra tahun 2015-2019 telah merencanakan bahwa produksi batubara akan dikendalikan dengan menetapkan batas acuan produksi. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara merupakan salah satu aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengendalian produksi batubara ini, namun selain Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terdapat aktor lain yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengendalian produksi batubara ini, aktor tersebut adalah Badan Usaha Pertambangan Batubara di Indonesia. Badan Usaha Pertambangan Batubara di Indonesia terbagi atas tiga kelompok, yaitu PKP2B, IUP, dan IUPK.

⁷² Ibid Pasal 387

1. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara.⁷³

2. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.⁷⁴

3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.⁷⁵

Berikut adalah tabel terkait Badan Usaha Pertambangan Batubara Di Indonesia :

Tabel 3. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

No	Nama Perusahaan	Tempat
1	Adaro Indonesia	Kalimantan Selatan
2	Antang Gunung Meratus	Kalimantan Selatan
3	Arutmin Indonesia	Kalimantan Selatan
4	Asmin Bara Bronang	Kalimantan Tengah
5	Asmin Bara Jaan	Kalimantan Tengah
6	Asmin Koalindo Tuhup	Kalimantan Tengah
7	Astaka Dodol	Sumatera Selatan
8	Bahari Cakrawala Sebuk	Kalimantan Selatan
9	Bangun Banua Persada Kalimantan	Kalimantan Selatan
10	Banjar Intan Mandiri	Kalimantan Selatan
11	Baramarta, PD	Kalimantan Selatan

⁷³ Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No.7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Dan Batubara

⁷⁴ Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁷⁵ ibid

No	Nama Perusahaan	Tempat
12	Baramutiara Prima	Sumatera Selatan
13	Bara Sentosa Lestari	Kalimantan Selatan
14	Batu Alam Selaras	Kalimantan Selatan
15	Baturona Adimulya	Sumatera Selatan
16	Berau Coal	Kalimantan Timur
17	Bharinto Ekatama	Kalimantan Timur
18	Borneo Indobara	Kalimantan Selatan
19	Dharma Puspita Mining	Kalimantan Timur
20	Ekasatya Yanatama	Kalimantan Timur
21	Firman Ketaun Perkasa	Kalimantan Timur
22	Gunung Bayan Pratama Coal	Kalimantan Timur
23	Indexim Coalindo	Kalimantan Timur
24	Indominco Mandiri	Kalimantan Timur
25	Insani Bara Perkasa	Kalimantan Timur
26	Interex Sacra Raya	Kalimantan Timur
27	Jorong Barutama Greston	Kalimantan Selatan
28	Kadya Caraka Mulia	Kalimantan Selatan
29	Kalimantan Energi Lestari	Kalimantan Selatan
30	Kaltim Prima Coal	Kalimantan Timur
31	Kartika Selabumi Mining	Kalimantan Timur
32	Karya Bumi Baratama	Jambi
33	Kendilo Coal Indonesia	Kalimantan Timur
34	Kideco Jaya Agung	Kalimantan Timur
35	Lahai Coal	Kalimantan Tengah
36	Lanna Harita Indonesia	Kalimantan Timur
37	Mahakam Sumber Jaya	Kalimantan Timur
38	Mandiri Intiperkasa	Kalimantan Utara
39	Mantimin Coal Mining	Kalimantan Selatan
40	Marunda Graha Mineral	Kalimantan Tengah
41	Multi Harapan Utama	Kalimantan Timur
42	Multi Tambang Jaya Utama	Kalimantan Tengah
43	Nusantara Termal Coal	Kalimantan Timur
44	Pendopo Energi Batubara	Sumatera Selatan
45	Perkasa Inakakerta	Kalimantan Timur
46	Pesona Khatulistiwa Nusantara	Kalimantan Utara
47	Riau Bara Harum	Riau
48	Santan Batubara	Kalimantan Timur
49	Singlurus Pratama	Kalimantan Timur
50	Sumber Kurnia Buana	Kalimantan Selatan

No	Nama Perusahaan	Tempat
51	Suprabari Mapanindo Mineral	Kalimantan Tengah
52	Tambang Damai	Kalimantan Timur
53	Tanito Harum	Kalimantan Timur
54	Tanjung Alam Jaya	Kalimantan Selatan
55	Teguh Sinar Abadi	Kalimantan Timur
56	Trubaindo Coal Mining	Kalimantan Timur
57	Wahana Baratama Mining	Kalimantan Selatan

Sumber : Data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara.⁷⁶

Tabel 4. Izin Usaha Pertambangan BUMN

No	Nama Perusahaan	Tempat
1	Bukit Asam	Sumatera Selatan

Sumber : Data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Izin Usaha Pertambangan BUMN adalah izin usaha pertambangan yang sahamnya dimiliki oleh negara. Sedangkan Izin Usaha Pertambangan PMA adalah izin usaha pertambangan yang dimiliki perusahaan yang kepemilikan sahamnya >50% dimiliki oleh asing. Berikut adalah tabel terkait Izin Usaha Pertambangan PMA

Tabel 5. Izin Usaha Pertambangan PMA

No	Nama Perusahaan	Tempat
1	Bara Alam Utama	Sumatera Selatan
2	Bina Insan Sukses Mandiri	Kalimantan Timur
3	Gerbang Daya Mandiri	Kalimantan Timur
4	Kaltim Jaya Mineral	Kalimantan Timur
5	Laskar Semesta Alam	Kalimantan Selatan

⁷⁶ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Dan Batubara

No	Nama Perusahaan	Tempat
6	Paramitha Cipta Sarana	Kalimantan Selatan
7	Semesta Sentra Mas	Kalimantan Selatan
8	Manambang Muara Enim	Sumatera Selatan
9	Mega Prima Persada	Kalimantan Timur
10	Tri Tunggal Pitriati	Kalimantan Selatan
11	Merge Continental Mining	
12	Merge Mining Industry	

Sumber : Data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

B. Kondisi Batubara Nasional

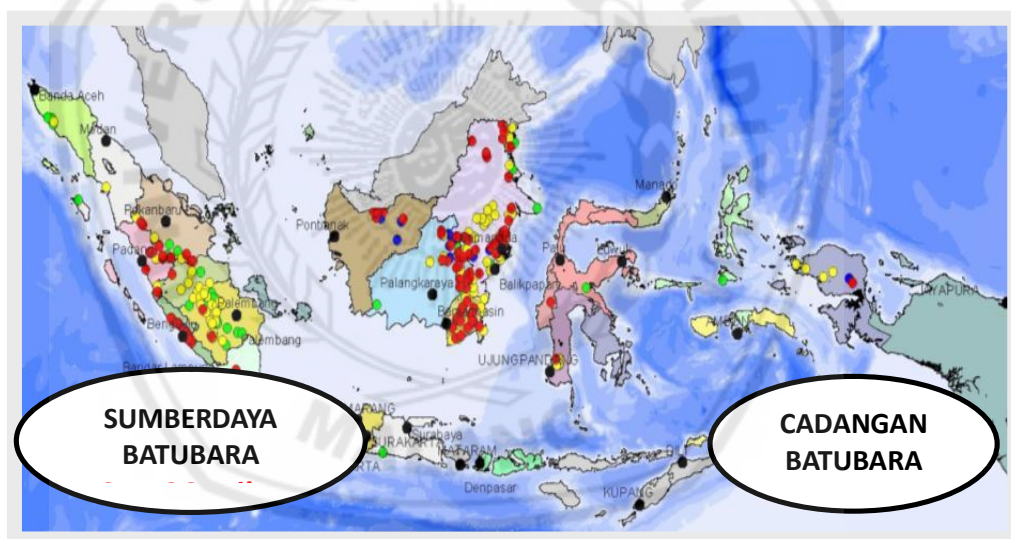
Melimpahnya kekayaan alam Indonesia seperti batubara yang merupakan salah satu kekayaan alam yang sifatnya tak terbaharukan/tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya yang persediaannya sebagai input produksi sangat terbatas dalam jangka waktu tertentu.⁷⁷ Oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan dengan memegang prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Batubara merupakan salah satu energi primer yang dimiliki oleh Indonesia yang cukup berperan dalam pembangunan nasional. seiring dengan berkembangnya pembangunan dan bertambahnya jumlah penduduk peningkatan konsumsi batubara merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu perkembangan pembangunan nasional akan sangat bergantung pada ketersediaan dan efisiensi penggunaan batubara.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan dasar hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan batubara di Indonesia. Berbicara mengenai pengelolaan dan pemanfaatan batubara, pada tahun 2010 hingga tahun 2014 produksi batubara mengalami peningkatan pada

⁷⁷ Purnomo Yusgiantoro. 2000. Ekonomi Energi Teori dan Praktik. Pustaka LP3ES: Jakarta hal 5

setiap tahunnya. Peningkatan produksi ini tidak diimbangi dengan peningkatan pemanfaatan batubara dalam negeri, hasil produksi batubara cenderung lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan ekspor. Bermula dari meningkatnya produksi batubara pada tahun 2010 hingga tahun 2014 ini maka pemerintah berusaha untuk mengendalikan produksi batubara. Hal ini dilakukan untuk menjaga pasokan batubara di Indonesia. Pasokan batubara untuk domestik memiliki keterkaitan dengan ketahanan energi nasional serta untuk mendukung pembangunan nasional, maka ketersediaan pasokan batubara sebagai sumber energi domestik perlu dijaga supaya tidak terjadi kelangkaan batubara.

Saat ini kondisi sumberdaya dan cadangan batubara di Indonesia adalah sebagai berikut :



Sumber : Data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

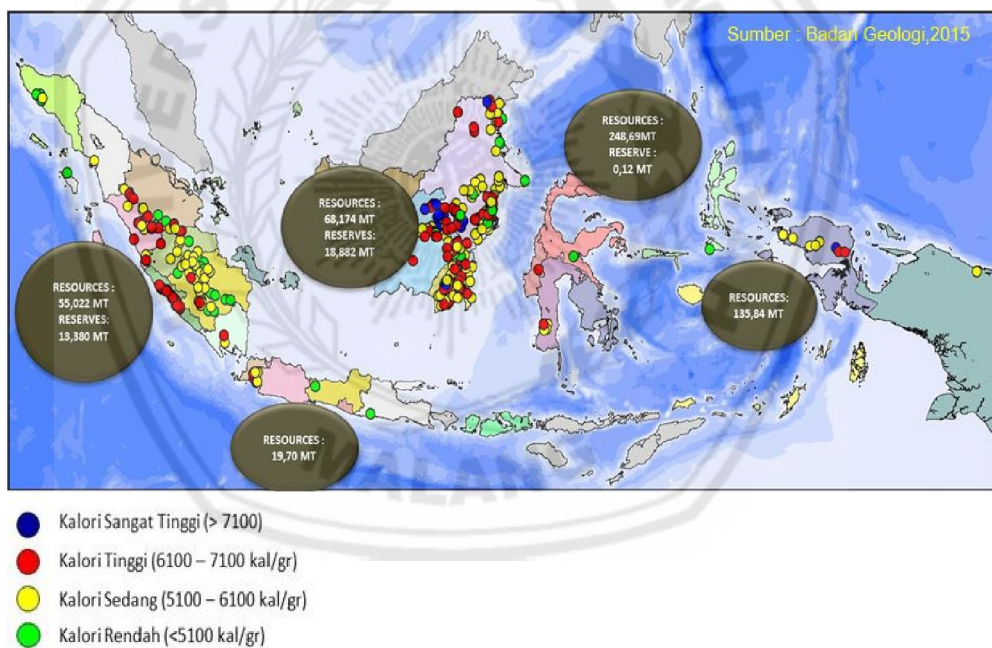
Gambar 3: Kondisi Sumberdaya dan Cadangan Batubara Indonesia

Oleh karena itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam dalam hal ini adalah batubara merencanakan bahwa produksi batubara akan dikendalikan. Adapun tujuan

pengendalian produksi ini adalah untuk menjamin ketahanan energi nasional, memenuhi daya dukung lingkungan, melakukan konservasi sumberdaya batubara, dan mengendalikan harga batubara nasional. Selain itu dengan adanya kebijakan pengendalian produksi batubara ini diharapkan nantinya dapat mewujudkan optimalisasi produksi batubara, pengendalian ekspor, dan konservasi sumberdaya batubara.

C. Peta Persebaran Batubara di Indonesia

Batubara merupakan sumber daya alam tak terbarukan yang dimiliki Indonesia dan tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Persebaran batubara ini rata-rata berada di pulau Sumatera dan Kalimantan. Berikut adalah gambar terkait persebaran batubara di Indonesia :



Sumber : Badan Geologi, 2015

Gambar 4: Peta Persebaran Batubara Di Indonesia

Berdasarkan gambar peta persebaran batubara diatas menunjukkan bahwa batubara yang ada di Indonesia tersebar di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Papua,

Sumatera, dan Jawa. Dimana setiap masing pulau memiliki sumberdaya dan cadangan yang berbeda-beda, sumberdaya terbesar adalah diwilayah Sulawesi yakni 248,69 milyar ton dengan cadangan batubara 0,12 milyar ton dan yang terkecil adalah diwilayah Jawa yakni 19,79 milyar ton tanpa sumberdaya cadangan. Batubara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara arif dan berkelanjutan. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan batubara yang ada di Indonesia harus dapat memanfaatkannya dengan baik sehingga keberadaan batubara di Indonesia memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan keberlanjutan pembangunan nasional dengan menjaga pasokan batubara untuk kepentingan dalam negeri.

D. Ekspor Batubara

Perkembangan produksi batubara di Indonesia selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, dimana penjualan hasil produksi ini lebih banyak dialokasikan untuk ekspor dari pada untuk domestik. Berdasarkan data dari Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi Edisi 6-April 2010 menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi negara pengeksport batubara nomor 2 di dunia. Berikut adalah tabel terkait negara pengeksport batubara terbanyak di dunia.

Tabel 6. Negara Pengekspor Batubara Terbanyak Dunia Tahun 2008

No	Negara	Batubara		
		Total	Steam	Cooking
1	Australia	252	115	137
2	Indonesia	203	173	30
3	Russia	101	86	15
4	Colombia	74	74	-
5	USA	74	35	39
6	South Africa	62	61	1
7	PR China	47	43	4

Sumber : Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi. Edisi 6-April 2010 Hal. 20

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa Indonesia merupakan negara pengekspor batubara kedua didunia setelah Australia. Padahal berdasarkan data Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi Edisi 6-April 2010 Indonesia merupakan negara penghasil batubara terbanyak nomor 6 didunia. Berikut adalah tabel terkait sepuluh negara negara penghasil batubara terbanyak di dunia.

Tabel 7. Negara Penghasil Batubara Terbanyak Didunia Tahun 2008

No	Negara	Jumlah (Mt)
1	PR China	2761
2	USA	1007
3	India	490
4	Australia	325
5	Russia	247
6	Indonesia	246
7	South Africa	236
8	Kazakhstan	104
9	Poland	84
10	Colombia	79

Sumber : Warta Mineral, Batubara & Panas Bumi Edisi 6-April 2010 Hal 21

Batubara merupakan salah satu sumber daya alam yang dijadikan sebagai sumber energi untuk pembangunan nasional. Sebagai salah satu sumber energi maka keberadaannya harus digunakan secara berkelanjutan. Kegiatan produksi dan pemasaran merupakan kegiatan yang mempengaruhi terhadap ketersediaan batubara di Indonesia. Meskipun Indonesia merupakan negara pengekspor batubara terbanyak nomor 2 di dunia pada tahun 2008, Produksi batubara di Indonesia masih mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, dimana alokasi hasil produksi ini lebih banyak digunakan untuk ekspor dari pada untuk domestik. Berikut adalah data terkait ekspor batubara :

Tabel 8. Ekspor Batubara di Indonesia

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Produksi	280	353	412	474	458
Domestik	65	66	67	72	76
Ekspor	210	287	333	402	382

Sumber : Data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Berdasarkan data diatas, produksi batubara lebih banyak dialokasikan untuk ekspor daripada untuk domestik. Padahal sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri”. Sehingga dalam rangka penyediaan batubara untuk kepentingan dalam negeri maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 84 ayat (1) menyatakan bahwa “

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus mengutamakan kebutuhan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri”.

Namun berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa hasil produksi batubara lebih dialokasikan untuk kegiatan ekspor, dimana terjadi kenaikan jumlah ekspor batubara dari tahun 2010 hingga tahun 2013 dan pada tahun 2014 ekspor batubara sedikit berkurang. Mengingat bahwa batubara merupakan salah satu sumber daya alam yang tak terbaharukan serta merupakan salah satu sumber energi primer maka pada tahun 2014 dalam mewujudkan ketahanan energi nasional pemerintah menempatkan batubara bukan menjadi komoditas ekspor semata akan tetapi sebagai modal pembangunan.

